

**KEPATUHAN HUNGARIA TERHADAP “*CHARTER OF
FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION*”
STUDI KASUS: PENGUNGS DI PERBATASAN HUNGARIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

VIVINTA NIA TANAVA BARUS

07041281722070

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**KEPATUHAN HUNGARIA TERHADAP 'CHARTER OF
FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION' STUDI
KASUS: PENGUNSI DI PERBATASAN HUNGARIA
SKRIPSI**

Disusun oleh:

**VIVINTA NIA TANAVA BARUS
07041281722070**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 20 Maret 2023

Pembimbing I

**Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP. 199208272019031005**



**Disetujui oleh,
Ketua Program Studi,**



**Sofyan Effendi, S.IP, M.Si.
NIP. 19770512 2003121003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“KEPATUHAN HUNGARIA TERHADAP ‘CHARTER OF
FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION’ STUDI
KASUS: PENGUNSI DI PERBATASAN HUNGARIA”**

Skripsi

Oleh :

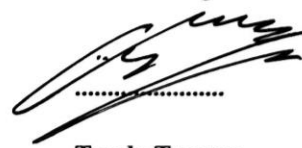
Vivinta Nia Tanava Barus
07041281722070

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 10 Mei 2023

Pembimbing :

1. **Muhammad Yusuf Abror S.I.P., M.A.**
NIP. 199208272019031005

Tanda Tangan




Penguji :

1. **Dra. Retno Susilowati, MM.**
NIP. 195905201985032003

Tanda Tangan




2. **Khairunnas, S.I.P., M.I.Pol.**
NIP. 0011059403



Mengetahui,



Ketua Jurusan Hubungan Internasional,



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivinta Nia Tanava Barus

NIM : 07041281722070

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kepatuhan Hungaria terhadap Charter Fundamental Right of The European Union” Studi Kasus : Pengungsi di Perbatasan Hungaria ” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 17 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



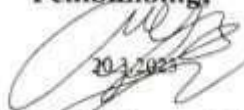
Vivinta Nia Tanava Barus
NIM. 07041281722070

ABSTRAK

Krisis migrasi 2015 di Uni Eropa menjadi isu yang menghubungkan berbagai masalah kebijakan, mulai dari ketakutan akan terorisme hingga kesejahteraan ekonomi, kontrol perbatasan, masalah identitas, dan tanggung jawab bagi seluruh negara anggota Uni Eropa, masalah ini mempengaruhi negara-negara anggota dalam berbagai cara yang berbeda, serta tanggapan yang bervariasi. Ketika Uni Eropa dilanda krisis imigran dengan datangnya hampir satu juta pencari suaka dari berbagai negara yang sedang mengalami konflik, gelombang migran yang terus berlanjut seiring dengan belum menentukannya kondisi keamanan negara-negara di Timur Tengah akibat krisis politik dan juga ancaman terhadap ekonomi pengungsi terutama dari negara yang terkena dampak konflik, sehingga memaksa pengungsi meninggalkan negara asal mereka karena kesulitan di negara asal mereka. Dalam penelitian ini negara Hungaria sebagai fokus dalam menghadapi para pengungsi yang melewati perbatasan negaranya dengan adanya *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang bertujuan menyatukan hak-hak dasar setiap orang yang tinggal di Uni Eropa, dan dampak yang muncul akibat tidak sesuainya tujuan piagam serta akibat yang terjadi dilihat pada kasus pengungsi di perbatasan Hungaria. Dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bentuk kepatuhan Hungaria terhadap *charter* berdasarkan kasus pengungsi di perbatasan Hungaria, menggunakan konsep kepatuhan dengan indikator pemikiran oleh Ronald B. Mitchell yaitu : *Outputs*, *Outcomes* dan *Impact* sehingga melalui indikator tersebut dapat mengklasifikasikan tingkat kepatuhan Hungaria yaitu *Active non-compliance* yang dibuktikan dengan sikap pemerintah Hungaria yang tidak mematuhi dan melaksanakan komitmen serta aturan yang telah disepakati bersama dalam menjalankan rezim internasional namun demikian respon Hungaria dengan memberikan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah pengungsi di negaranya.

Kata Kunci : *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, Kepatuhan, Rezim Internasional, Uni Eropa, Pengungsi, Hungaria.

Pembimbing:



Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.

NIP. 199208272019031005

Indralaya, 20 Maret 2023

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Solihah Fendi, S.I.P., M.Si.

NIP. 197705127003121003

ABSTRACT

The European Union's 2015 migration crisis has become an issue that connects a wide range of policy concerns, from fears of terrorism to economic well-being, border control, identity issues, and responsibilities for all EU member states, affecting member states in different ways, with varying responses, the wave of migrants continued along with the uncertain security conditions of countries in the Middle East due to political crises and also threats to the economy of refugees, especially from conflict-affected countries, forcing refugees to leave their home countries due to difficulties in their home countries. In this research, Hungary as a state is the focus in dealing with refugees who cross its borders with the existence of the Charter of Fundamental Rights of the European Union which aims to unite the basic rights of everyone living in the European Union, and the impacts that arise due to non-compliance with the objectives of the charter and the consequences that occur seen in the case of refugees at the Hungarian border. By using a qualitative method to analyze the form of Hungary's compliance with the international regime of the Charter of Fundamental Rights of the European Union based on the case of refugees at the Hungarian border, using the concept of compliance with the indicators of thought by Ronald B. Mitchell : Outputs, Outcomes and Impact to classify Hungary's level of compliance, which is Active non-compliance as evidenced by the Hungarian government's response that does not comply with implement the commitments and rules that have been mutually agreed upon in carrying out the international regime, however, Hungary's response is to provide other alternatives in solving the refugee problem in its country.

Keywords: *Charter of Fundamental Rights of the European Union, International Regime, Compliance, European Union, Refugees, Hungary.*

Advisor,

20.8.2023

Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.

NIP. 199208272019031005

Indralaya, 20 March 2023

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Soekarno Endi, S.I.P., M.Si.

NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data serta arahan yang saya perlukan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; serta
3. Kepada seluruh orang-orang yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat untuk penguatan ilmu dikemudian hari.

Indralaya 20 Mei 2023

Vivinta Nia T. Barus
07041281722070

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Secara Praktis	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kerangka Teori	16
2.2.1 Rezim Internasional.....	16
2.2.2 Kepatuhan Rezim Internasional	18
2.3 Alur Pemikiran	22
2.4 Argumentasi Utama	22
BAB III	24

METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Defenisi Konsep.....	25
3.2.1 Teori Kepatuhan Rezim	25
3.3 Fokus penelitian	27
3.4 Unit Analisis	28
3.5 Jenis dan Sumber Data	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	29
3.7.1 Triangulasi teori	29
3.8 Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV.....	31
GAMBARAN UMUM PENELITIAN	31
4.1 Sejarah <i>Charter of Fundamental Rights of the European Union</i>	31
4.2 Tujuan <i>Charter of Fundamental Rights of the European Union</i>	33
4.3 Ratifikasi Hungaria Terhadap <i>Charter of fundamental rights of the European Union</i>	35
4.4 Profil Hungaria	36
4.5 Sejarah Kedatangan Pengungsi ke Hungaria.....	38
4.5.1 Pengungsi di Perbatasan Hungaria	39
BAB V	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
5.1 Kepatuhan Hungaria terhadap <i>Charter of Fundamental Rights of the European Union</i> menggunakan analisis kepatuhan oleh Ronald B. Mitchell.....	43
5.1.1 <i>Outputs</i>	43
5.1.2 <i>Outcomes</i>	51
5.1.3 <i>Impact</i>	56
5.2 Tingkat kepatuhan Hungaria Terhadap <i>Charter of Fundamental Rights of the European Union</i> berdasarkan kasus pengungsi di perbatasan Hungaria	61
BAB VI.....	65
PENUTUP.....	65

6.1 Kesimpulan.....	65
6.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	11
Tabel 3.1	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	5
Gambar 2	38
Gambar 3	41
Gambar 4	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keinginan individu untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman tanpa batas di berbagai lingkungan menjadi hal yang dicari oleh para pengungsi di dunia untuk melakukan migrasi. Orang yang telah melarikan diri negara asal karena konflik bersenjata sering kali memenuhi syarat status pengungsi, meskipun kondisi ini tidak ditentukan sebagai alasan suaka dalam Konvensi Pengungsi (Commte, 2013). Secara umum pengungsi ialah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam, dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom. Setiap pengungsi biasanya ditempatkan di sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurus dan menolong mereka. Lama pengungsi berada di sebuah tempat penampungan tidak dapat di prediksi, tergantung dari kondisi dan situasi itu sendiri. Biasanya pengungsi diurus oleh pemerintah setempat, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk datangnya bantuan dari relawan.

Pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut karena pengungsi adalah suatu status yang diakui oleh hukum internasional (POLI, 2017). Uni Eropa dibangun di atas hak-hak dasar,

demokrasi, dan supremasi hukum yang saling terkait erat dan memandu tindakan internal dan eksternal Uni Eropa (Teresa & Bazo, 2008). Dalam penyusunan piagam ini, *European Council* (Dewan Eropa) memilih metode terbuka daripada negosiasi diplomatik. Tanggung jawab diberikan terhadap badan yang terdiri dari perwakilan kepala negara dan pemerintahan dan presiden komisi serta anggota parlemen Eropa dan parlemen nasional, dengan perwakilan pengadilan Eropa berpartisipasi sebagai pengamat. Perwakilan dari komite ekonomi, sosial dan komite daerah serta ahli individu diundang untuk memberikan pandangan mereka, sehingga adanya *Charter of Fundamental Rights European Union* yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2000 dan mulai berlaku pada Desember 2009 sebagai instrumen yang menetapkan hak sipil, politik, ekonomi dan sosial, menyatukan kebebasan dan hak pribadi terpenting yang dinikmati oleh warga negara Uni Eropa ke dalam satu dokumen yang mengikat secara hukum. Piagam ini berlaku dalam hubungannya dengan sistem perlindungan hak-hak dasar nasional dan internasional, termasuk konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Tujuan dari piagam ini adalah untuk mempromosikan hak asasi manusia di dalam wilayah Uni Eropa dimana hak-hak yang diabadikan dalam piagam yang memiliki 7 bab pembahasan, yakni : (1) *Dignity*, (2) *Freedoms*, (3) *Equality*, (4) *Solidarity*, (5) *Citizens' rights*, (6) *Justice /Keadilan*,(7) *General Provisions* (Toth, 2002).

Uni Eropa tengah dilanda krisis imigran dengan datangnya hampir satu juta pencari suaka (*asylum seekers*) dari berbagai negara yang sedang mengalami konflik seperti Suriah, Afghanistan, Libya, dan Iraq menuju Eropa. Gelombang migran yang terus berlanjut seiring dengan belum menentunya kondisi keamanan negara-negara di Timur Tengah akibat krisis politik dan juga ancaman terhadap ekonomi pengungsi terutama dari negara yang terkena dampak konflik, sehingga memaksa pengungsi meninggalkan negara asal mereka karena

kesulitan di negara asal mereka. *Convention Relating To The Status of Refugees* 1951 mendefinisikan alasan untuk menerima pengungsi atau pencari suaka sebagai ketakutan penganiayaan di negara asal berdasarkan ras, agama, kebangsaan, pendapat politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu.

Charter of Fundamental Rights European Union menetapkan hak-hak politik, sosial dan ekonomi tertentu yang harus dihormati lembaga-lembaga Uni Eropa ketika menjalankan kekuasaan mereka. yang berarti bahwa Dewan Eropa, Parlemen Eropa, Pengadilan Eropa, dan badan atau lembaga Uni Eropa lainnya harus menghormati hak-hak ini ketika mereka membuat undang-undang, memutuskan kasus, atau bertindak dalam kapasitas resmi. Negara Anggota Uni Eropa perlu menghormati hak-hak ini ketika mereka menerapkan hukum Uni Eropa (Commission, An official website of the European Union, 2011). Dalam konsep *charter* mengandung sistem yang kuat namun karena adanya permasalahan mengenai pengungsi, dan bentuk perlindungan yang menyangkut prinsip dasar kebijakan Uni Eropa yang menerima kedatangan imigran dengan berlakunya kuota pengungsi bagi negara-negara anggotanya ternyata memunculkan perbedaan sikap termasuk negara Hungaria yang menentang kebijakan tersebut.

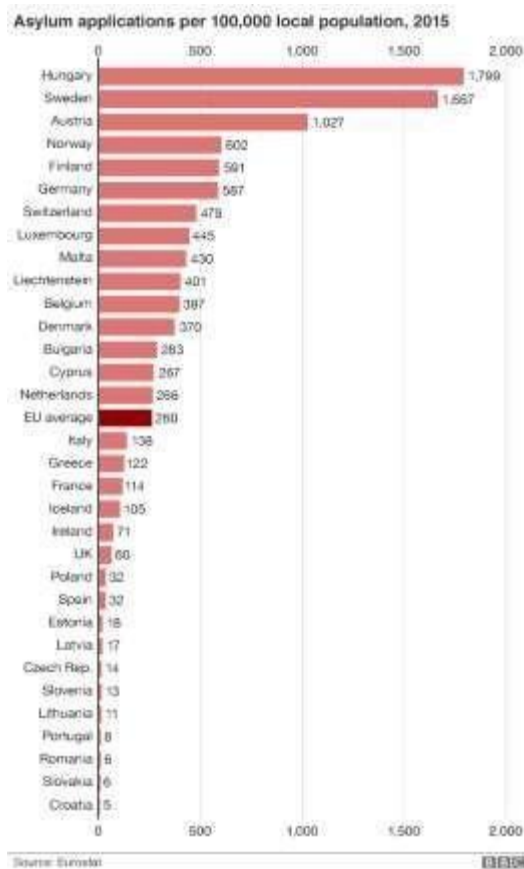
Meskipun kebanyakan pengungsi tidak menjadikan Hungaria sebagai tujuan akhir menetap, Hungaria merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa tengah dengan posisi geografis letak Hungaria yang dekat dengan Austria, di mana Austria sangat dekat dengan Jerman, banyak pengungsi yang menganggap bahwa Hungaria adalah negara yang strategis, baik jika dijadikan sebagai suaka maupun sebagai negara transit untuk ke Jerman dan negara Eropa Barat lainnya. Hal ini semakin diperjelas dengan rute yang ditempuh oleh pengungsi dari Timur Tengah menuju Eropa. Pengungsi masuk ke Eropa menuju Turki, kemudian ke Yunani,

menuju Serbia, hingga akhirnya menuju tujuan terakhirnya yaitu Hungaria. Hungaria juga memiliki sejarah dalam menampung pengungsi pada masa Perang Balkan. Namun jumlahnya kalah besar dengan jumlah pengungsi yang datang dari negara-negara yang mengalami konflik di Timur Tengah, Afrika, dan Asia (Juhász A. H., 2015). Pembahasan yang ingin diteliti mengenai bagaimana negara Hungaria dengan adanya *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang bertujuan menyatukan hak-hak dasar setiap orang yang tinggal di Uni Eropa, dan dampak yang muncul akibat ketidaksesuaian tujuan piagam dan akibat yang terjadi diperkenalkan untuk memberikan konsistensi dan kejelasan terhadap hak-hak yang ditetapkan pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda di masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Menurut data yang ditemukan *European Commission* pada tahun 2015 meskipun banyak negara Eropa yang menjadi tempat tujuan para pengungsi namun negara yang paling terdampak akibat melonjaknya pengungsi di Uni Eropa adalah negara Hungaria. Meskipun banyak negara yang dijadikan sebagai tujuan imigran mencari suaka, seperti negara Jerman yang memiliki aplikasi suaka paling banyak pada tahun 2015, namun Hungaria memiliki jumlah perbandingan tertinggi berdasarkan populasi dan jumlah pengungsi, berbagai upaya yang dilakukan seperti menutup perbatasannya dengan Kroasia sebagai usaha untuk menghentikan aliran tersebut, namun perbandingan pencari suaka dengan jumlah penduduk Hungaria adalah yang tertinggi yakni lebih kurang 1.800 pengungsi per 100,000 penduduk Hungaria pada tahun 2015, diikuti oleh Swedia dengan 1.667 pengungsi per 100.000 penduduk (Commission, 2022). Data selengkapnya mengenai hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 1

Grafik Jumlah Aplikasi Suaka per 100.000 Penduduk UE 2015



Sumber : BBC News (BBC, 2016)

Pada dasarnya seluruh negara anggota Uni Eropa memiliki aturan dan hak yang sama untuk membantu para pencari suaka sebagai bentuk kemanusiaan karena setiap orang dapat memiliki hak yang sama berdasarkan status hukum yang berbeda untuk masuk, menetap, dan bekerja di negara tertentu. Walaupun akan berbeda bagi setiap imigran, antara menjadi seorang imigran tidak sah dan menjadi seorang pengungsi atau pencari suaka yang tidak jelas (Menéndez, 2003). Ada beberapa kekurangan dalam undang-undang tentang suaka, serta dalam praktiknya, tetapi badan yang bergerak dalam HAM internasional menganggap masalah tersebut akan diperbaiki oleh otoritas Hungaria. Hal-hal berikut harus ditingkatkan pelatihan

petugas dan juru bahasa yang memenuhi syarat, kondisi tempat penampungan komunitas penjaga perbatasan, informasi yang diberikan kepada pencari suaka tentang hak-hak mereka, pemutakhiran basis data negara asal, integrasi pengungsi yang diakui. Sebenarnya terdapat beberapa masalah akibat pelonjakan pengungsi di Hungaria bahkan beberapa organisasi HAM, seperti Komite Helsinki Hungaria, Pusat Hak Asasi Manusia Hungaria dan Asosiasi Pengungsi, yang telah mengkritik ketentuan yang berhubungan dengan pencari suaka dan orang asing dalam paket legislatif anti-kejahatan di hadapan Parlemen (November 1998) karena mereka tidak menghormati standar hak asasi manusia internasional. Organisasi hak asasi manusia memprotes perlakuan terhadap imigran ilegal dan mengklaim bahwa Hungaria secara ilegal menahan imigran di pusat penjaga perbatasan selama berbulan-bulan dalam kondisi yang sangat buruk karena peningkatan jumlah imigran ilegal secara tiba-tiba (Parliament, European Parliament, 1999). Pola migrasi dan politik saling berinteraksi, demikian pula halnya dengan krisis pengungsi tahun 2015.

Krisis migrasi 2015 di Uni Eropa menjadi isu yang menghubungkan berbagai masalah kebijakan, mulai dari ketakutan akan terorisme hingga kesejahteraan ekonomi, kontrol perbatasan, masalah identitas, dan tanggung jawab umum Eropa terhadap pengungsi. Akibatnya masalah-masalah ini mempengaruhi negara-negara anggota dalam berbagai cara yang berbeda, dan tanggapannya juga sangat bervariasi. Dari negara-negara yang paling terkena dampak, Hungaria hingga sekarang titik masuk pertama untuk rute migrasi Balkan ke UE telah mendapat perhatian media yang meningkat secara internasional, dan sering dituduh melakukan pelanggaran sehubungan dengan perlakuan terhadap para migran (Szalai, 2015). Terdapat lima aspek dari pergeseran sikap dan preferensi politik yang terkait dengan migrasi yang mengakibatkan penilakan terhadap pengungsi dan penentangan *charter* oleh Hungaria yakni :

(1) persepsi publik, (2) xenofobia, (3) pembuatan kebijakan, (4) politik kepartaian, dan (5) sistem politik (Juhász A. M., 2017).

Banyak migran menggunakan Hungaria sebagai batu loncatan untuk migrasi lebih lanjut, karena Hungaria adalah negara paling 'Barat' di kawasan ini. Hal ini memungkinkan para migran untuk menetap, bereksperimen dan bersiap untuk migrasi lebih lanjut. Status sosial imigran transit beragam, diantaranya adalah kaum intelektual, pekerja kasar dan pedagang pasar skala kecil dimana lebih dari setengahnya berusia di bawah 30 tahun. Krisis pengungsi telah menyebabkan kebijakan-kebijakan Uni Eropa dalam suaka dan pengungsi tersebut kurang optimal dalam menghadapi tekanan arus migrasi. Sebelum terjadinya krisis terdapat berbagai kebijakan umum Uni Eropa dalam penanganan pengungsi seperti *Schengen Agreement*, *Dublin Convention*, dan *Common European Asylum System* (CEAS). Kebijakan-kebijakan ini menjadi bagian penting dalam perkembangan kebijakan suaka dan pengungsi Uni Eropa yang berpengaruh hingga sebelum terjadinya krisis pengungsi Uni Eropa melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan melainkan karena merasa memiliki tanggung jawab dalam melindungi setiap orang yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan yang tercantum dalam *Charter of Fundamental Rights European Union*, serta hasil dari Konvensi Jenewa 1951 terhadap status pengungsi sebagai kewajiban internasional (Menéndez, 2003).

Isu mengenai krisis pengungsi yang dihadapi negara-negara Uni Eropa merupakan tantangan besar, terutama dalam kebijakan *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang membantu masalah HAM bagi imigran dan pencari suaka. Rencana relokasi dan sistem pembagian kuota pengungsi ke seluruh negara-negara anggota diajukan oleh Komisi Eropa demi menyelesaikan masalah ini. Namun, respon yang diberikan oleh negara-negara anggota terhadap rencana tersebut ternyata berbeda-beda. Beberapa negara anggota setuju

dengan rencana tersebut, dan beberapa menolak dengan keras. Dengan memperhatikan hal-hal ini, maka penting untuk membahas mengenai rezim internasional Uni Eropa terhadap masalah pengungsi di Uni Eropa oleh negara Hungaria. Pendekatan yang berhasil harus melibatkan semua segmen kunci dari masyarakat Hungaria untuk membangun demokrasi dan supremasi hukum pada akhirnya menjadi suatu proses politik yang membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil secara berkelanjutan dalam pendekatan dengan penjatuhan hukuman, seperti anjuran oleh beberapa komisaris dan anggota parlemen Uni Eropa, mungkin bahkan memperburuk keadaan dan secara serius menghambat proses pembangunan demokrasi di Hungaria (Huysmans, *The European Union and the securitization of migration.*, 2011).

Komisi dewan parlemen memutuskan untuk memulai beberapa tindakan hukum terpisah terhadap Hungaria pada tahun 2012 memulai proses hukum melawan Hungaria untuk menantang 3 poin undang-undang baru yang disahkan di bawah konstitusi baru. Bahkan setelah adopsi yang Keempat amandemen konstitusi Hungaria pada Maret 2013, Komisi Uni Eropa menyatakan keprihatinan serius “atas kompatibilitas Amandemen Keempat Hukum Fundamental Hungaria dengan legislasi Uni Eropa dan dengan prinsip supremasi hukum” dan meningkatkan kemungkinan memulai lebih jauh proses pelanggaran bagi Hungaria (Bugaric, 2014). Masalah yang menyebabkan konflik terhadap negara yang dijadikan sebagai tujuan pengungsi sebagai alasan untuk menolak dan mengabaikan rezim yang telah disepakati mengakibatkan adanya peraturan baru yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi akibat kedatangan pengungsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang tepat untuk membahas penelitian ini adalah : “Bagaimana kepatuhan Hungaria terhadap *Charter of Fundamental Rights of the European Union* berdasarkan Studi kasus pengungsi di perbatasan Hungaria?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin mengidentifikasi jenis tingkat kepatuhan negara Hungaria terhadap adanya *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan mengetahui hal apa saja yang dilakukan pemerintah Hungaria terhadap masalah pengungsi di perbatasan negaranya setelah meratifikasi *charter* ke dalam hukum nasional Hungaria.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Dalam pembahasan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua elemen dan siapa saja yang tertarik pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini khususnya mengenai *Charter of Fundamental Rights of the European Union* maupun seputar *Uni Eropa* dalam mengkaji fenomena internasional yang berkaitan dengan sikap suatu negara, khususnya terhadap kasus pengungsi, mengenai kebijakan suatu negara dalam menangani pengungsi serta menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan rujukan maupun referensi, sebagai sumber informasi bagi para mahasiswa hubungan internasional serta pemerhati

masalah-masalah internasional, menghadapi masalah pelanggaran peraturan yang terjadi di wilayahnya.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis dalam pembahasan penelitian ini akan memberikan hasil berupa bahan pertimbangan dan sumber informasi terutama yang berhubungan dengan penerapan sebuah kebijakan yang dilaksanakan serta pengaruh yang muncul akibat adanya implementasi kebijakan tersebut terutama bagi Hungaria dan memberikan gambaran pengungsi di perbatasan Hungaria serta melihat kepatuhan Hungaria terhadap *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh negara lain sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan *charter* yang serupa mengenai pengungsi sehingga dengan berkaca terhadap pemerintah Hungaria negara lain yang juga tengah menghadapi krisis pengungsi di negaranya dapat menangani kasus pengungsi secara lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International UK, Press releases* . (2015, juli 7). Diambil kembali dari Amnesty International UK, Press releases Web : <https://www.amnesty.org.uk/press-releases/migrants-heading-europe-facing-abuse-and-extortion-balkans>
- Barbé, E. (2011). Cooperación y conflicto en las relaciones internacionales (La teoría del régimen internacional) [Cooperation and conflict in international. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 55-67.
- BBC. (2016, Maret). *Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts*. Diambil kembali dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>
- Breitmeier, H. L. (2006). The international regimes database as a tool for the study of international cooperation. *European journal of international relations*, 77.
- Brittain, S. (2015). The Relationship Between the EU Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights: An Originalist Analysis. *European Constitutional Law Review*, 11(3), 482-511.
- Bugaric, B. (2014). Protecting democracy and the rule of law in the European Union: The Hungarian challenge. *leqs Paper*, (79).
- Butler, E. (2007). Hungary and the European Union: the political implications of societal security promotion. *Europe-Asia Studies*, 59 (7).pp. 1115-1144. ISSN 0966-8136 .
- Cantat, C. (2020). Governing migrants and refugees in Hungary: Politics of spectacle, negligence and solidarity in a securitising state. *In Politics of (dis) integration* .
- Commission, E. (2011, Maret 31). Diambil kembali dari An official website of the European Union: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_207
- Commission, E. (2022). *European Union*. Diambil kembali dari An official website of the European Union: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/hungary_en

- Committee, H. H. (2022, April 25). *OVERVIEW OF THE LEGAL FRAMEWORK Hungary*. Diambil kembali dari The Asylum Information Database (AIDA): <https://asylumineurope.org/reports/country/hungary/overview-legal-framework/>
- Commte, V. (2013, June 17). European Commission for Democracy through Law on the Fourth Amendment of the Constitution of Hungary. *Law Opinion*, 32 & 144.
- Dawson, M. &. (2013). Hungary and the Indirect Protection of EU Fundamental Rights and the Rule of Law. *German Law Journal*, 14(10), 1959-1979. doi:10.1017/S2071832200002595.
- De Schutter, O. (2016). The implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU Institutional Framework. 49-50.
- Djajaatmadja, J. (. (2008). *Pengantar Hukum Internasional 2: Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dunai, M. (2017). Hungary builds new high-tech border fence-with few migrants in sight. *Reuters*.
- Edwards, J. &. (2005). Compliance: A review. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 48–59.
- Encyclopædia Britannica, I. (2022, October). *Encyclopædia Britannica*. Diambil kembali dari Encyclopædia Britannica, Inc.: <https://www.britannica.com/place/Hungary#/media/1/276730/61275>
- Gall, L. (2016, Oktober 03). *Hungary's treatment to refugees is a Disgrace to its*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2016/10/03/hungarys-treatment-refugees-disgrace-its-history>
- Gereöffy, A. Ç. (2008). Ukrainian Migration to Hungary: A Fine Balance between Migration Policies and Diaspora Politics . *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 6:3, 326-343.
- Gil-Bazo, M. T. (2008). The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the right to be granted asylum in the Union's law. *Refugee Survey Quarterly*, 27(3), 33-52.

- Gyollai, D. &. (2019). Controlling irregular migration: International human rights standards and the Hungarian legal framework. *European Journal of Criminology*, 16(4), 432-451.
- Haggard, S. &. (2007). Theories of international regimes. *International Organization*, 41(3), 491-517. doi:10.1017/S0020818300027569.
- Halmai, G. (2018). The Application of European Constitutional Values in EU Member States. *European Journal of Law Reform* , 10.
- Hansenclever. (2000). Integrating Theories of International Regimes. *Review of International Studies*.
- Hasan, I. M. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hungary, M. o. (2012). *Hungary's National Security Strategy*. Budapest: Ministry of Foreign Affairs of Hungary.
- Huysmans, J. (2011). The European Union and the securitization of migration. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 38(5), 751-777.
- Ivanova, D. (2017). Hungarian Security Policy and the Migrant Crisis (2015–2017). *International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION*, 167.
- Jenei, G. (2012). A PUBLIC-POLICY ANALYSIS OF A KEY DECISION. *Society and Economy*, 34(1), 163–177. <http://www.jstor.org/stable/41472193>.
- Johnson, J., & Barnes, A. (2015). Financial nationalism and its international enablers: The Hungarian experience. *Review of International Political Economy*, 538.
- Juhász, A. H. (2015). *Focus on Hungary: Refugees, Asylum and Migration*. Prague: Heinrich-Böll-Stiftung.
- Juhász, A. M. (2017). Refugees, asylum and migration issues in Hungary. *Heinrich-Böll-Stiftung.*, 7-18.
- Keohane, R. O. (1982). The demand for international regimes. *international organization*, 36(2), 325-355.

- Kirton, J. (2009). *International Organization (1st ed.)*. London: Routledge.
- Koca, B. T. (2019). Bordering practices across Europe: The rise of “walls” and “fences”. *Migration Letters*, 16(2), 183-194.
- Kovács, Á. (2016). The Fiscal Council in the Hungarian Fundamental Law. *Public Finance Quarterly*, 61(3), 312.
- Krasner, S. D. (1982). Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables. *International Organization*, 36, pp 185-205
doi:10.1017/S0020818300018920.
- Krasner, S. D. (2009). *Structural Causes dan Regime Consequences Regime as Intervening Variables*. New Jersey: Cambridge University.
- Levy, M. A. (1995). The study of international regimes. . *European journal of international relations*, 1(3), 267-330.
- Levy, M. A. (2019). The study of international regimes. *European journal of international relations*, 1(3), 267-330.
- Lischer, S. (2005). *Dangerous Sanctuaries: Refugee Camps, Civil War, and the Dilemmas of Humanitarian*. New York: Cornell University Press.
- Macartney, C. A. (2022, October 23). *www.britannica.com*. Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/place/Hungary>
- Martin, A. (2005). Environmental Conflict Between Refugee and Host Communities. *Journal of Peace Research* , 42 (3): 329-47.
- Marton, Z. (2017). Populism and the refugee crisis: The communication of the Hungarian government. *Media and Communication Studies Malmo University*, 34.
- McCrudden, C. (2002). The Future of the EU Charter of Fundamental Rights. *SSRN*, 8.
- McLaughlin Mitchell, S. &. (2007). International institutions and compliance with agreements. *American Journal of Political Science*, 51(4), 721-737.

- Menéndez, A. J. (2003). Chartering Europe: Legal status and policy implications of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 40(3), 471-490.
- Mitchel, R. B. (2000). Compliance Theory . In *Compliance, Effectiveness and Behavior Change in International Environmental Law* (p. 896). London: Oxford University Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nagy, B. (2016). *Hungarian Asylum Law and Policy in 2015–2016: Securitization Instead of Loyal Cooperation in: Special Issue Constitutional Dimensions of the Refugee Crisis*. Budapest: Central European University.
- Orrenius, P. M. (2016). Irregular immigration in the European Union. *European Policy Analysis*.
- Orrenius, P. M., & Zavodny, M. (2016). Irregular immigration in the European Union. *Federal Reserve Bank of Dallas, Working papers*.
- Parliament, E. (2015, September 8). The EU Charter of Fundamental Rights in Hungary. *FRA – EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS*, 2-4.
- Parliament, E. (2017). Integration of Refugees in Greece, Hungary and Italy, Comparative analysis. *European Journal of Law Reform* , 23.
- POLI, M. E. (2017). KEBIJAKAN HUNGARIA TERHADAP KRISIS PENGUNGSI DI KAWASAN EROPA. *Doctoral dissertation*, 7-9.
- Rights, E. U. (2019, August 20). *Publications Office of the European Union*. Diambil kembali dari An official website of the European Union: <https://data.europa.eu/doi/10.2811/003875>
- Sabic, S. S., & Boric, S. (2016). *At the Gate of Europe: A Report on Refugees on the Western Balkan Route*. Washington DC: Friedrich Ebert Stiftung.
- Safjan, M. (2012). AREAS OF APPLICATION OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION: FIELDS OF CONFLICT? *EUI Working Paper LAW* , 12.

- Salehyan, I. &. (2006). Refugees and the spread of civil war. International organization. *International organization*, 60(2), 335-366.
- Schweller, R. &. (1997). A tale of two realisms: Expanding the institutions debate. *Mershon International Studies Review*, 41(1), 1–32.
- Stoica, M. M. (2012). European Mechanisms for the Protection of Human Rights-Charter of Fundamental Rights of the European Union-A Historical and Legal Perspective. *Cogito: Multidisciplinary Res Journal*, 73.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Szalai, A. &. (2015). Securitizing migration in contemporary Hungary. *CEU Center for EU Enlargement Studies Working Paper*, 2-3.
- Teresa, M., & Bazo, G. (2008). The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Right to be Granted Asylum in the Union's Law. *Refugee Survey Quarterly*, Volume 27, Issue 3, 33-52. Diambil kembali dari Refugee Survey Quarterly: <https://doi.org/10.1093/rsq/hdn044>
- Toth, A. (2002). The Charter of Fundamental Rights of the European Union. *Direito e Justiça*, 16(1), 171-189.
- Van Kersbergen, K. &. (2007). The politics of international norms: Subsidiarity and the imperfect competence regime of the European Union. *European Journal of International Relations*, 13(2), 217-238.
- Young, O. R. (2022, June 13). *The Politics of International Regime Formation: Managing Natural Resource and the Environmental*. Diambil kembali dari JSTOR: <http://www.jstor.org/stable2706651>.
- Zoltan Kekesi, M. (2017). Hungary: Migration and the policy of closed borders. *AMO Briefing paper*, 3.